

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2005 pasca pengesahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu, masyarakat di daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan kepala daerah yang paling tepat untuk membangun daerah menjadi lebih baik. Menurut Suharizal (2012:9) dengan adanya pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan *figure* pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan dengan segelintir *elite* politik.

Televisi menjadi salah satu media berpolitik yang kerap digunakan. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan media (baca: media massa) yang memiliki kekuatan: mampu menjangkau khalayak secara luas, pesan disampaikan secara terbuka dan simultan, mampu menembus dimensi ruang dan waktu, serta memiliki pesona yang atraktif dan persuasif (Rakhmat, 2005: 188-189). Televisi hakikatnya menjadi media yang menyajikan kebenaran akan suatu berita sebab tingkat kepercayaan masyarakat pada media ini mencapai 96%.

Media televisi menjadi sumber rujukan calon pemilih untuk mengenali sosok kandidat. Citra kandidat bergantung pada konstruksi citra di media. Apabila suatu media memberitakan seorang calon secara positif dan *intens*

bukan mustahil dapat menggiring opini publik sehingga menilai kandidat tersebut pada citra yang baik. Begitu sebaiknya, ketika media memberitakan calon yang lain dengan nada negatif maka media mampu membuat penilaian *minus* terhadap kandidat tersebut dibenak penontonnya. Hal ini justru memperjelas anggapan bahwa televisi adalah media yang gamang.

Fenomena kerentanan media dalam pemberitaan politik dapat dilihat saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Saat itu kondisi politik di media sedang memanas. Penonton disajikan dua perspektif yang sangat kontras di waktu yang sangat krusial yaitu pemilihan kepala negara. Berdasarkan penelitian Zakia Megasari Basahil (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa pemberitaan yang sering diberitakan Metro TV mengenai berita positif lebih banyak pemberitaan mengenai Jokowi-JK (44,08%) dibandingkan Prabowo-Hatta (5,37%), sebaliknya di TV One lebih sering memberitakan Prabowo-Hatta (25,80%), dibandingkan Jokowi-JK (2,15%). Hal itu menunjukkan bahwa kedua stasiun televisi tersebut memiliki kecenderungan pemberitaan yang berat sebelah kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berbeda. Padahal Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3 SPS) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (2012) mengatur dalam pasal 11 tentang perlindungan kepentingan publik berbunyi lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Dan program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.

Nurudin (2007:34) menyatakan bahwa ketergantungan masyarakat pada media massa, akan menjadikan media sebagai alat yang dapat membentuk apa dan bagaimana suatu masyarakat tersebut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Bila dikaitkan politik dengan media massa, tak dapat dipungkiri bahwa saat ini politik Indonesia berada di tengah masyarakat massa (*mass society*) yang bersifat heterogen dengan keanggotaan yang *anonym*. Namun, mereka belum diperlakukan layaknya warganegara namun lebih sebagai komoditas politik untuk mendulang suara. Dalam konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi bagian yang integral dari politik, tetapi media massa justru menjadi sentral dalam politik (Pawito, 2009:91).

Peristiwa politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi sangat menarik untuk diberitakan media massa karena mengandung banyak kepentingan publik. Pilkada tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Kepala daerah yang dipilih juga dari berbagai tingkat yaitu pemilihan bupati, walikota hingga gubernur. Masa kampanye pilkada kali ini juga cukup panjang yaitu mencapai 4 bulan, dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018.

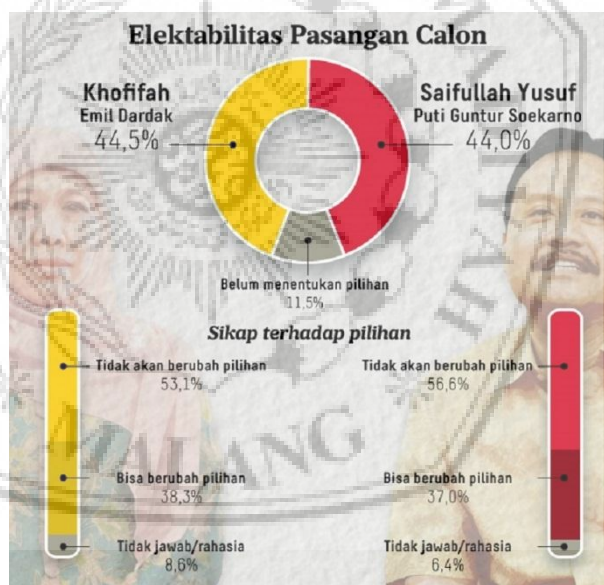
Salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak adalah Jawa Timur. Duet kepemimpinan antara Sukarwo-Syaifullah Yusuf telah menginjak tahun ke sepuluh atau telah memasuki periode kedua. Kini masyarakat Jawa Timur harus memilih pemimpin daerahnya yang baru. Dilihat dari jumlah pemilihnya, pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 ini adalah yang terbesar kedua se-Indonesia setelah Jawa Barat. Berdasarkan data

dari KPUD Jatim tahun 2018, jumlah pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 30.155.719 pemilih. Dari jumlah tersebut tercatat 15.315.352 pemilih perempuan dan 14.540.367 pemilih laki-laki dari 13 kabupaten dan 5 kota.

Pilgub Jatim kali ini menjadi sangat menarik untuk disimak sebab rivalitas antara dua kandidat yang relatif seimbang. Pasangan nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa, pernah dua kali menjadi menteri yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan di era pemerintahan Gus Dur dan Menteri Sosial pada masa jabatan Jokowi sebelumnya pun ia juga sudah lama duduk di kursi DPR. Khofifah didampingi oleh Emil Dardak yang tengah menjabat sebagai bupati Trenggalek, meskipun belum lama terjun di dunia perpolitikan, Emil diyakini menjadi representasi dan dapat meraup suara dari kalangan anak muda. Rivalnya, Syaifullah Yusuf atau yang lebih akrab dipanggil Gus Ipul ini pernah duduk sebagai anggota DPR, sempat menjabat menjadi Sekertaris Jendral PKB selama 5 tahun dan beliau pernah pula menjadi Menteri Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu sebelum kemudian terpilih dua kali sebagai wakil gubernur Jatim mendampingi Pakde Karwo. Gus Ipul ditemani oleh Puti Guntur Soekarno sebagai cawagubnya, ia saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI FPDIP Komisi X. Bila boleh ditarik garis keturunan, Puti adalah cucu dari presiden pertama Indonesia dari putra Guntur Soekarnoputra.

Dilihat dari kekuatan partai pengusung dan/atau partai pendukung, kekuatan antara dua kandidat memang tidak berbeda jauh. Khofifah-Emil didukung oleh enam partai pengusung yaitu Golkar, Partai Demokrat, PPP,

NasDem, PAN dan Hanura. Sedangkan Gus Ipul-Puti didukung oleh empat partai pengusung yang cukup dominan di Jawa Timur yaitu PDIP, PKB, PKS dan Gerindra. Tak hanya dukungan partai saja yang hampir setara, elektabilitas dan tingkat popularitas kedua pasangan calon di mata masyarakat Jawa Timur juga dapat dikatakan sama. Bahkan dari banyak lembaga survei yang telah melakukan *polling* suara, hasilnya hampir berimbang. Misalnya saja hasil survei dari Litbang Kompas, selisih suara diantara keduanya tidak begitu jauh dengan persentase masyarakat yang belum menentukan pilihan masih cukup besar. Berikut *infographic* hasil survey dari Litbang Kompas Maret 2018:



**Gambar 1.1** Survei Litbang Kompas Maret 2018

Dengan keseimbangan elektabilitas antara kedua calon maka peran media massa justru lebih besar untuk meyakinkan masyarakat yang masih *abu-abu*. Sebab dari suara merekalah yang akan menentukan siapa pemimpin Jawa Timur selanjutnya. Tanggungjawab ini diambil oleh media-media massa lokal,

tak terkecuali televisi lokal Jawa Timur. Pemberitaan tentang Pilgub Jatim oleh televisi lokal mempunyai nilai berita (*news values*) yang lengkap seperti *timeliness*, *proximity*, *significance*, *magnitude*, *conflict*, dan *prominence*. Untuk itu JTV hadir dan mengklaim sebagai Saluran Pilkada Jatim.

JTV adalah salah satu anak perusahaan Jawa Pos yang bergerak dibidang media elektronik televisi. Jangkauan JTV meliputi hampir seluruh Jawa Timur secara *terrestrial* di 10 kota besar. JTV memiliki program-program berita yang selalu mengabarkan tentang perkembangan pilkada seperti Jatim Awan, Pojok Pitu, dan Pojok Kampung. Meskipun semua program tersebut memuat pemberitaan pilkada serentak namun Pojok Pitu memiliki segmen khusus dan lebih sering mengabarkan berita terkini seputar pilkada Jawa Timur.

Ditarik lebih jauh, pers dituntut menjaga kejujuran, akurasi, dan keseimbangan. Namun, media massa tak terkecuali televisi memiliki keterbatasan ruang untuk mengabarkan fakta secara keseluruhan kedua pasangan calon, sehingga yang tersaji di media massa adalah potongan-potongan fakta pilihan yang telah disortir oleh redaksi. Media massa harus memilah, memilih, menonjolkan dan menyembunyikan fakta dalam rangkaian peristiwa pemilihan gubernur ini. Hal ini memungkinkan adanya kecenderungan pemberitaan untuk kepentingan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba mengetahui netralitas pemberitaan pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 pada stasiun televisi lokal

dengan menggunakan metode penelitian analisis isi pada program berita Pojok Pitu JTV dalam periode kampanye 15 Februari hingga 23 Juni 2018.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah “Apakah program berita Pojok Pitu JTV telah memberitakan tentang pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 secara netral?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui gambaran yang lebih detail mengenai netralitas pemberitaan pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 pada program berita Pojok Pitu JTV.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi dan menambah pengetahuan yang berkaitan dengan bidang komunikasi, khususnya pembahasan mengenai isi media tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) dengan melihat netralitas pemberitaan pada media televisi.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi redaksi JTV, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur mengenai kecenderungan pemberitaan Pilgub Jawa Timur tahun 2018 pada stasiun televisi lokal. Selain itu, membantu mahasiswa lainnya dalam memperoleh data ataupun informasi untuk melakukan penelitian sejenis.

